



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HUNAENI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
3. NHK : 486679

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 90.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/131 m2 di KOTA PALU ,
HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
90.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 251.972.557

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 476.972.557

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 476.972.557

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.